

PROFESIONALISME APARATUR DALAM PENYALURAN BERAS SEJAHTERA DI KELURAHAN MALALAYANG SATU TIMUR

Julita Fitria Mabala

Arie Rorong

Very Londa

Abstract : This study aims to determine how Professionalism of the apparatus in the distribution of prosperous rice in the eastern malalayang village. This research was conducted in may 2017. This research used qualitative method that is research type used to research on natural object condition where the researcher is a key instrument, data collection technique is done by tringulation (merges), data analalysis in inductive and the results of research qualitative emphasizes the meaning of gener-lation. Infomants in this study amounted to 12 people, namely head of urban village 1 person, head of environment 3 people, implementing unit of distribution and citizen counted 7 people. The results of this study note that the pofessionalism of the apparatus in the distribution of prosperous rice in the eastern malalayang village seen from the aspect of creative, innovation and responsiveness is good enough, but if measured in terms of abliitiy can not be said professional. Based on existing research in view of the accuracy of the administration has not been met well, still found data collection that has not been right target due to lack of coordination and cooperation between urban village apologists. Referring to some of the results of this study, then as a suggetion and solution and problem solving in this research are: (1). The government should be more critical in responding to any good public complaints between the village government on beneficiary households (3). Every year needs to be done data collection again because poverty it self is relative meaning in the moon alone can move from poverty to prosper or vice versa (4). The availability of a box complaints or suggestions in each village, because considering there are people who may be embarrassed or afraid to submit complaints and suggestions. (5) the importance of socialization between the community and the village apparatus regarding the distribution of properous rice.

Key word: Pofessionalism, Apparatus

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang berusaha membangun dalam segala bidang aspek seperti politik, sosial, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia oleh generasi terdahulu. Dan menjadi suatu keharusan untuk generasi selanjutnya untuk mempertahankan serta mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang kehidupan. Salah satu bidang yang sedang dalam proses pembangunan yaitu bidang ekonomi. Pembangunan merupakan hal mendasar yang dilakukan setiap negara untuk memajukan kehidupan warga negaranya. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang tak dapat terelakkan di berbagai belahan dunia, baik di Negara yang maju dan berkembang.

umumnya lemah dalam kemampuan belahan Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan

tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum.

Secara konseptual kemiskinan dapat dipandang dari berbagai segi. Pertama-tama dari segi subsistem. Berbicara mengenai kemiskinan, tidaklah mudah dalam mendefinisikannya, karena kemiskinan bersifat relatif. Mengingat kemiskinan mempunyai sifat relatif, maka perlu adanya klasifikasi kemiskinan. hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mempermudah dalam pendataan dan juga mempermudah dalam menentukan suatu golongan tertentu dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut.

Tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia sangat mempengaruhi proses pembangunan dan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan. Dimana kemiskinan menunjukkan dan menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang rendah, karenanya berbagai kebijakan pemerintah lewat berbagai program pembangunan yang inklusif, terus dilakukan oleh pemerintah agar jurang antar si kaya dan si miskin tidak semakin lebar. Meskipun telah demikian kemiskinan masih terus menjadi masalah yang mempengaruhi kemajuan dan peningkatan berbagai bidang pembangunan. Kemiskinan di pandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan, yang keberadaannya di tandai oleh adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.

Secara bersamaan kenyataan tersebut bukan saja menimbulkan tantangan tersendiri, tetapi juga memperlihatkan adanya suatu mekanisme dan proses yang tidak baik dalam pembangunan, terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan semakin lebar. Meskipun telah demikian kemiskinan masih terus menjadi masalah yang mempengaruhi kemajuan dan peningkatan berbagai bidang pembangunan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal, baik rendahnya tingkat pengetahuan maupun tidak adanya akses terhadap pekerjaan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai makhluk hidup. Dampak kemiskinan dapat dipandang dari berbagai segi;

- 1) Dari segi subsistem, dimana penghasilan dan jerih payah seseorang hanya pas-pasan untuk di makan saja, atau bahkan tidak pula cukup untuk itu. Segi ketidak merataan menekankan pada posisi relatif dari setiap golongan menurut penghasilannya terhadap posisi golongan yang lain.

- 2) Dari segi eksternal, dimana mencerminkan konsekuensi sosial dari kemiskinan terhadap masyarakat di sekelilingnya, yaitu bagaimana kemiskinan yang berlarut-larut mengakibatkan dampak sosial yang tidak ada habis-habisnya.

Salah satu program nasional dalam program bantuan sosial langsung kepada masyarakat adalah pemberian beras untuk keluarga berpenghasilan rendah yakni beras sejahtera (Rastra) yang sebelumnya kita kenal dengan sebutan beras miskin (Raskin) Kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga negara. Program raskin pada bulan september 2015 telah diganti nama menjadi program beras sejahtera oleh menteri sosial yang pada dasarnya untuk mengubah paradigma masyarakat miskin, melainkan program ini disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Beras sejahtera (Rastra) merupakan subsidi pangan yang di peruntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya pemerintah untuk membantu ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran, dengan jumlah yang sudah ditentukan dan diberikan satu kali perbulan.

Tujuan program Rastra adalah untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) dan sekaligus diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) dan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang di tentukan.

Sebagai program yang dilaksanakan secara Nasional pemberian beras sejahtera kepada masyarakat berpenghasilan rendah juga dilaksanakan di Kelurahan Malalayang Satu Timur. Kecamatan Malalayang yang terbagi dalam 7 lingkungan. Dalam pelaksanaan program beras sejahtera ini kerap kali terjadi penyimpangan ataupun masalah-masalah yang dihadapi pelaksana maupun masyarakat pra sejahtera sebagai penerima beras sejahtera. Berdasarkan pengamatan, banyak keluarga-keluarga yang mengeluhkan dan merasa tidak adil dalam penyaluran beras sejahtera, adapun keluhan yang ada, diantaranya dimana ada keluarga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut padahal keluarga ini masuk dalam kategori penerima rastra, namun sebaliknya ada keluarga yang tidak pantas untuk mendapatkan bantuan tersebut akan tetapi nama keluarga itu ada dalam daftar penerima rastra. Akibat salah sasaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menyebabkan RTS (rumah tangga sasaran) tidak menerima haknya dalam mendapatkan subsidi rastra, yang akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Dalam hal inilah didapat isikap para pemberi layanan yang tidak profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak sensitif, dan terlihat jelas aparatur yang ada tidak kreatif dimana tidak adanya suatu gagasan, tindakan ataupun ide baru yang berhubungan dengan

masalah penyaluran raskin tersebut. Belum adanya inovasi atau perubahan dari data yang lama, dan terkesan acuh tak acuh, serta memilah-milah dalam penyaluran beras sejahtera tersebut. Kurangnya respon, kepedulian dari aparaturnya yang ada kepada masyarakat setempat, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah yang ada, dimana sangatlah berpengaruh pada tugas dan fungsi yang akan di jalankan. Berdasarkan pra survey jumlah penerima manfaat beras sejahtera (Raskin) di kelurahan malalayang satu timur ada 338 keluarga dari 5.811 keluarga yang terdaftar di kelurahan malalayang satu timur.

Kenyataan tersebut diatas mengindikasikan pada permasalahan profesionalisme aparaturnya di Kelurahan Malalayang Satu Timur dalam penyaluran beras sejahtera. Sebab permasalahan yang berhubungan dengan ketepatan data penduduk miskin, yang berhak menerima beras sejahtera serta proses administrasi layanan akan sangat tergantung pada profesionalisme kerja aparaturnya. Ketika aparaturnya yang ada profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mungkin permasalahan tersebut diatas tidak terjadi.

Dengan melihat kondisi demikian menjadi sebuah tantangan bagi peneliti untuk melakukan kajian secara ilmiah di dalam menyingkapkan permasalahan tentang **“Profesionalisme Aparatur Dalam Penyaluran Beras Sejahtera. Studi Kasus: Kelurahan Malalayang Satu Timur”**.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme adalah merupakan wujud kepemimpinan. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam tujuan pencapaian organisasi. Dalam pandangan Miftah Thoha (2010: 49) mengartikan kepemimpinan dalam gaya kepemimpinan otokratis sebagai gaya yang didasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otokratis yang dilakukan pemimpin dengan sikapnya yang menang sendiri, tertutup saran dari orang lain dan memiliki idealisme. Menurut Dwiyanto (2011:157) profesionalisme yaitu “Paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparaturnya dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparaturnya yang mengutamakan kepentingan publik”.

Istilah profesional itu berlaku untuk semua aparat mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan ketrampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut

kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas, terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin di capai oleh sebuah organisasi (Kurniawan, 2005:74).

Profesionalisme menurut Sedarmayanti (2010:96) adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efektivitas, dan efisiensi serta bertanggung jawab. Menurut Siagian (2000:163) profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah di sederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi;

a. Kreatif

Kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi. Hal ini perlu diambil untuk mengakhiri penilaian miring masyarakat kepada birokrasi publik yang dianggap kaku dalam bekerja. Terbentuknya aparatur yang kreatif hanya dapat terjadi apabila; terdapat iklim yang kondusif yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk mencari ide baru dan konsep baru serta menerapkannya secara inovatif; adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan antara lain melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, karier dan penyelesaian permasalahan tugas.

b. Inovasi

Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah hasil pekerjaan yang telah dicapai.

c. Responsifitas

Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara tepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu faktor yang menghambat kelancaran dan efektifitas birokrasi publik adalah tidak profesionalnya aparatur birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak profesionalnya aparatur birokrasi publik indonesia dapat dilihat dari banyaknya temuan para pakar dan pengalaman pribadi masyarakat di lapangan tentang pelayanan publik yang di selenggarakan birokrasi. Lambannya birokrasi dalam merespon aspirasi publik serta pelayanan yang terlalu prosedural (red tape) merupakan sedikit contoh diantara sekian banyak ketidakberesan dalam dunia birokrasi publik indonesia.

Bintoro (2001: 96), juga mengemukakan profesionalisme diartikan sebagai kemampuan tinggi bahkan expertise dalam menjalankan tugas selaku aparatur publik dalam menjalankan roda manajemen pemerintahan dan dalam perumusan kebijakan publik. Setelah mencermati dan memahami berbagai pendapat dan pandangan para pakar tentang pengertian profesionalisme, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa profesionalisme tidak hanya dimiliki oleh seseorang saja tetapi juga menyangkut kemampuan dalam mengantisipasi segala perubahan lingkungan termasuk kemampuan dalam merespon aspirasi publik dan melakukan inovasi yang pada akhirnya membuat pekerjaan menjadi mudah dan sederhana.

D. Program Beras Sejahtera (Rastra)

Beras sejahtera (Rastra) sebutan yang baru di tahun 2017 ini, yang sebelumnya kita kenal dengan sebutan Beras miskin (Raskin) namun mempunyai artian yang sama yang merupakan sebuah program dari pemerintah yaitu bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia yang berupa penjualan beras dibawah harga pasar kepada penerima tertentu. Rastra merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Menurut Pedoman Umum (PEDUM) Rastra (2017) terdapat Indikator Keberhasilan Program Rastra agar bisa sampai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu dilihat dari:

1. Tepat waktu
2. Tepat sasaran
3. Tepat jumlah
4. Tepat harga
5. Tepat kualitas
6. Tepat administrasi

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah profesionalisme aparatur dalam penyaluran beras sejahtera di Kelurahan Malalayang Satu Timur, yang dilihat dari;1. Kreatif; 2. Inovasi; 3. Responsifitas

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian Di Kelurahan Malalayang Satu Timur

D. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi memberikan informasi tentang Profesionalisme Aparatur Dalam Penyaluran Beras Sejahtera di Kelurahan Malalayang Satu Timur. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian di pilih secara “Purposive”, yaitu berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut di atas maka informan yang di wawancarai dalam penelitian ini sebanyak 12 orang, yaitu:

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

1. Wawancara (*interview*) adalah kegiatan yang dilakukan pada saat konteks yang dianggap tepat guna dalam mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berkali-kali secara frekuentatif sesuai dengan keperluan peneliti tentang kejelasan masalah penelitian yang difokuskannya. Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, dan pemahamannya.
2. Observasi
Observasi yakni pencacatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti yang terkait dengan profesionalisme aparatur dalam penyaluran beras sejahtera di Kelurahan Malalayang Satu Timur
3. Study Kepustakaan (*library Research*)
Yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen baik berupa sumber tertulis, gambar, dan karya-karya monumental, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan profesionalisme aparatur dalam penyaluran beras sejahtera di Kelurahan Malalayang Satu Timur

F. Teknik Analisa Data

Analisis data model Miles & Huberman. Miles & Huberman (dalam Sugiyono 2012), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan /verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dari penuturan beberapa informan di atas mengenai profesionalisme aparatur dalam penyaluran beras sejahtera yang dilihat dari segi:

1. Kreatif

Dari segi kreatif para aparatur kelurahan dalam penyaluran beras sejahtera belum terlalu kreatif terlihat jelas bahwa pemerintah yang ada masih menggunakan cara lama dalam hal penyaluran rastra.

2. Inovasi

Dari segi inovasi berdasarkan penelitian pemerintah kelurahan yang ada seperti yang dikatakan salah seorang kepala lingkungan bahwa dari aparatur kelurahan sudah berupaya untuk melakukan inovasi dalam yaitu dengan melakukan survey kembali nama-nama keluarga penerima manfaat program rastra.

3. Responsifitas

Dilihat dari segi responsifitas masyarakat menilai aparatur yang ada masih kurang respon terhadap masalah penyaluran rastra yang sampai saat ini masih saja terjadi permasalahan dengan penerima manfaat yang tidak tepat sasaran.

Data penerima rastra untuk tahun 2017 dari ke 7 lingkungan yang ada di Kelurahan Malalayang Satu Timur sebelum dan sesudah di pangkas, adalah sebagai berikut:

1) Lingkungan 1

Sebelum : 24 kk

Sesudah : 10 kk

2) Lingkungan 2

Sebelum : 15 kk

- | | | |
|-----------------|---------|----------|
| | Sesudah | : 13 kk |
| 3) Lingkungan 3 | | |
| | Sebelum | : 12 kk |
| | Sesudah | : 7 kk |
| 4) Lingkungan 4 | | |
| | Sebelum | : 15 kk |
| | Sesudah | : 6 kk |
| 5) Lingkungan 5 | | |
| | Sebelum | : 38 kk |
| | Sesudah | : 26 kk |
| 6) Lingkungan 6 | | |
| | Sebelum | : 147 kk |
| | Sesudah | : 107 kk |
| 7) Lingkungan 7 | | |
| | Sebelum | : 86 kk |
| | Sesudah | : 88 kk |

Jumlah penerima raskin/rastra sebelumnya ada 338 kk dan untuk data yang baru pada tahun ini ada pengurangan 81 kk yang tidak lagi menerima beras sejahtera, dan yang wajib menerima di tahun 2017 ini ada 257 kk, sedangkan untuk lingkungan 7 (tujuh) yang ada bukannya berkurang akan tapi bertambah 2 keluarga.

Pembahasan

Program Beras Miskin (RASKIN) pada Tahun 2017 telah berubah menjadi Beras Sejahtera (RASTRA). Penyaluran beras subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah telah di laksanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1998. Program ini pada awalnya di sebut dengan Operasi Pasar Khusus (OPK) yang dilaksanakan sebagai program darurat untuk merespon krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Pada perkembangannya, program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan hak dasar berupa kebutuhan pangan pokok dan dikenal dengan sebutan Raskin/Rastra.

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, bantuan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah akan di transformasikan menjadi bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta mendorong inklusi keuangan. Penyaluran bantuan pangan secara non tunai akan memanfaatkan sistem perbankan

sehingga penerima manfaat dapat membeli kebutuhan pangan dengan pilihan beragam serta sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Penyaluran bantuan pangan secara non tunai akan dilaksanakan secara bertahap mulai di 44 (empat puluh empat) kota terlebih dahulu pada tahun 2017, sementara kabupaten/kota lainnya masih menggunakan mekanisme penyaluran dengan pola subsidi (Rastra).

Adapun Kedudukan Tugas dan Fungsi dari Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan pemerintahan setingkat.

1. Kedudukan

Pelaksana distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerima/penolakan Rastra dari Perum Bulog di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 an melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
- f. sasaran dari penerima manfaat rastra.

Di dalam suatu organisasi lembaga pemerintahan Kreatif dan inovasi sangat penting untuk ditumbuhkembangkan. Demikian juga dalam pemerintahan di kelurahan malalayang satu timur terlebih khusus dalam penyaluran rastra tanpa adanya kreatif dan inovasi serta responsif dari para pemerintah yang ada akan berakibat organisasi yang kurang berkembang dan kinerjanya akan selalu menjadi sorotan masyarakat, dan akan berdampak kritikan bagi aparaturnya sendiri. Seperti halnya permasalahan yang berhubungan dengan penyaluran raskin/rastra. Para aparaturnya yang ada di tuntut agar

selalu bersikap kritis dan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat, bahwa aparaturnya yang ada tidak melakukan suatu perubahan dan terkesan hanya mengikuti atau menjalankan sebagaimana sebelumnya seperti contoh halnya nama keluarga-keluarga penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, dan itu pun yang selalu menjadi masalah yang tidak pernah lepas dalam penyaluran rastra di Kelurahan Malalayang Satu Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian profesionalisme aparaturnya dalam penyaluran beras sejahtera di Kelurahan Malalayang Satu Timur, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profesionalisme aparaturnya dilihat dari segi kreatif dalam penyaluran beras sejahtera di Kelurahan Malalayang Satu Timur belum bisa dikatakan profesional karena melihat aparaturnya yang ada belum terlalu kreatif, tidak ada hal baru atau cara baru dari pemerintah kelurahan dalam hal penyaluran rastra.
2. Profesionalisme aparaturnya dilihat dari segi inovasi belum sepenuhnya di tindaklanjuti perubahan yang ada belum maksimal. Pemerintah juga hanya menjalankan pekerjaan berdasarkan perintah atasan semata berdasarkan dari pemberi wewenang yakni dari pemerintah pusat. Jadi aparaturnya kelurahan mempunyai keterbatasan dalam hal memberi inovasi atau perubahan dalam penyaluran rastra.
3. Profesionalisme aparaturnya dilihat dari segi responsifitas atau tingkat kepekaan serta kepedulian masih sangat minim. Berdasarkan keterbatasan yang ada Pemerintah dinilai kurang sensitif dalam menanggapi keluhan-keluhan yang ada masyarakat menilai aparaturnya yang ada terkesan tidak peduli dan tidak mau mengambil resiko dalam memperjuangkan dan menyampaikan kepada pemberi wewenang dalam hal penyaluran beras sejahtera yang belum juga terlepas dari masalah tidak tepat sasaran.

B. SARAN

Sebagai saran dari peneliti untuk terwujudnya aparaturnya yang profesional dalam penyaluran beras sejahtera yaitu:

1. Perlu adanya koordinasi/kerjasama yang baik antara pemerintah kelurahan dengan pemerintah pusat dalam melakukan pendataan ulang kembali Rumah Tangga Sasaran (RTS) secara pertahun. Dan disarankan ada baiknya untuk pendataan tersebut di dampingi langsung oleh setiap kepala

lingkungan yang akan di lakukan pendataan, agar tidak terjadi salah sasaran dalam penyaluran beras sejahtera tersebut.

2. Sebaiknya harus ada sosialisasi dengan masyarakat sebelum penyaluran rastra dengan menyampaikan mengenai berapa jumlah beras yang masuk, dan jumlah masyarakat yang akan menerima. Karena perlu adanya keterbukaan dari aparat kelurahan kepada masyarakat agar menghindari pandangan miring dan penilaian masyarakat atas kinerja para aparatur yang terkesan tidak responsif dengan keluhan para masyarakat yang berhubungan dengan rastra.
3. Dalam hal pengaduan masyarakat, sebaiknya aparatur kelurahan menyediakan kotak saran/pengaduan di kelurahan untuk merespon bilamana ada keluhan masyarakat tentang pelayanan terutama dalam penyaluran rastra, karena mengingat ada masyarakat yang mungkin malu ataupun takut untuk menyampaikan keluhan mereka.
4. Sebagai saran peneliti setiap organisasi terlebih lembaga pemerintahan haruslah memiliki Visi dan Misi agar supaya dalam menjalankan tugas dan fungsi itu bisa terarah berdasarkan tujuan dari organisasi atau lembaga pemerintahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bintoro. 2001. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: MIA UNKRIS.

Dwiyanto. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Harefa. A. 2004. *Membangkitkan Etos Profesionalisme*. Jakarta: Gramedia.

Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Miftah. T. 2012. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Oerip. S. 2000. *Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan (Solusi Melalui Pengembangan Sikap Mental)*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sedarmayanti. 2000. *Untukmu Dewan Ketahanan Pangan*. Bandung: Masyarakat Geografi Indonesia.

Setiawan. G. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Siagian. P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Tjokrowinoto. 2001. *Birokrasi dalam Polemik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sumarsono S. 2004. *Metode Riset Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widodo. J.. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: Bayumedai Publishing.

Sumber lain:

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

KBBI. 2008. Tentang Profesionalisme.

PEDUM No. 1 Tahun 2016 Tentang Raskin.

PEDUM Tahun 2017 Tentang Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA).

Sumber lainnya:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Pembangunan Desa*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang *Desa*.